

## DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda N., **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Cetakan 1, Bandung, 2003
- Amrullah, M. Arief., **Kejahatan Korporasi**, Banyumedia, Cetakan I, Malang, 2006
- Chazawi, Adami, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo Persada, cetakan 3, 2007
- Farid, H.A. Zainal Abidin., **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Cetakan ke 2, Jakarta, 2007
- Huda, Chairul, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap teori pemisahan tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)**., Kencana Prenada Media, Cetakan 1, Jakarta, 2006
- Hamzah, Andi, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 2008
- Kelsen, Hans., **Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Dasar Ilmu Hukum Empirik Deskriptif)** Alih bahasa : Somardi; Rimdi Press; Cetakan 1, Edisi Terbatas; Jakarta, 1995
- Lamintang, P.A.F., **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Cetakan 3, Bandung, 1997
- Marpaung, Leden, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Media Grafika, Cetakan 4, Jakarta, 2008
- Muladi., Arief, Barda Nawawi., **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Cetakan 3, Bandung, 2005
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan-7, Jakarta, Tahun 2002
- Purwoleksono, Didik Endro., **Bahan Perkuliah Kebijakan Hukum Pidana**, Program Magister Hukum Universitas Airlangga, 2009
- Prodjodikoro, Wirjono; **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**; Rafika Aditama, Cetakan kedua; Edisi Revisi, Tahun 2008
- Prodjohamidjojo, Martiman; **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2**, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan 1, Jakarta, 1997

- Puspa, Yan Pramadya; **Kamus Hukum (Edisi Khusus Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)**, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1977
- Rommelink, Jan; **Hukum Pidana (Komentar-komentar Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia)**, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Salah, Roeslan; **Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana**, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Tanpa Tahun
- Schaffneister, D.; Keijzer E, N.; Sutorius, PH.; **Hukum Pidana**, Liberty, Edisi Pertama, Cetakan 2, Yogyakarta, 2003
- Soesilo, R., **Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Komentar-komentarnya**, Politeia, Bogor, 1995
- Sjahdeini, Sutan Remy; **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Grafiti Pers, Jakarta, 2007
- Sutedi, Adrian., **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (dan Berbagai permasalahannya)**, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008
- Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Cetakan ke 2, Malang, 2009
- Rancangan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana (RUU KUHP); Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM, Tahun 2005.

#### SUMBER INTERNET /WEBSITE

- Online book [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)/Tranparency International, Alih Bahasa Fahmia Biadib, **Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Handbook - Curbing Corruption in Public Procurement)**, dipublikasi Tranparency International, Berlin Germany, 2006.
- [http://www.dscrib.com/Wiryanto Dewabroto/Simulasi Numerik Berbasis Komputer Sebagai Solusi Pencegah Bahaya Akibat Kegagalan Bangunan/slip line theory](http://www.dscrib.com/Wiryanto_Dewabroto/Simulasi_Numerik_Berbasis_Komputer_Sebagai_Solusi_Pencegah_Bahaya_Akibat_Kegagalan_Bangunan/slip_line_theory)
- Kamus online **Wikipedia**., <http://en.wikipedia.org>.
- [www.detiksurabaya.com](http://www.detiksurabaya.com)

## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 **Tentang Jasa Kontruksi**; Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1999

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 **Tentang Bangunan Gedung**; Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 **Tentang Peraturan Hukum Pidana**; Lembaran Negara Nomor : 127 Tahun 1958

## **PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 **Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4330